

## DAFTAR REFRENSI

### Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achamd Ali, 2005. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Pamuladi, 1993. *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta
- Effendy Perangin. 2005. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- G. Kartasapoetra, dkk. 1991. *Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Hendra Arjunda Dan Atika Thahira, *Kumpulan Catatan Pengertian Dasar Tentang Hukum*. Tika Lestari (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021
- Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta.: Liberty, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada, Media Group, Jakarta
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*,

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Rusmadi Murad, 2007, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju,. Bandung

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Sasongko, Wahyu. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2000. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum sebuah pengantar, Edisi ke-2 Cetakan ke5, Liberty, Yogyakarta

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung

Urip Santoso, 2009, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana

Wahyu sasongko. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen

### **Jurnal :**

Ahmad Basarah dan Hasanuddin, Tb. (Ed). 2016, Historitas dan Spiritualitas Pancasila: Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan MPR RI., hlm. 31-32

Al Araaf Ode Pota (2022) Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa. Vol. 4. No. 2 September

Alam Setia Zain. 1995. Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

- Arpian. 2013. Penolakan Pengajuan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara Di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak
- Dapiq Syahal Manshur (2013) Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Farid Mustafa, Muhammad Ilham Arisaputra. 2022. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Diatas Tanah Hak Milik Oleh Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum. Vol. 4. No. 2 September (2022).
- Nuraini, L, Runtung, Syahrin.,A., Se,biring, R. (2014) Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Warga Masyarakat Di Atas Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Sk Menteri Kehutanan RI no. Sk. 463/Menhut-Ii/2013 di Kota Batam
- Nuraini, L & Haryanti D (2021) Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Hak Atas Tanah Ber Status Quo di Pulau Galang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 28 (2) 307-324. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4>
- Maria Rita Roewiastoeti. 2014. "Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." Wacana edisi 33, tahun XVI, 2014
- Myrna Safitri, "Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia: Model, Masalah dan Rekomendasi", dalam Adriaan Bedner dan Ward Berenschot (ed.) Masa Depan Hak-Hak Komunal atas Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan. Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan BAPPENAS, 2010
- Ni Luh Ariningsih Sari, 2020, Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum) Jurnal Ganec Swara Vol. 14 No.1
- Rozi Aprian Hidayat. 2016. Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. Jurnal Kajian Hukum Keadilan Vol IV Nomor
- Siti Rachma Mary, Y. Arizona, dan N. Firmansyah, "*Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.*" *Kertas Kerja Epistema Institute No.01/2012*. Jakarta: Epistema Institute.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 41/PRTM/M/2007 tentang pedoman dan kriteria teknis kawasan budidaya

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 176/kpts-II/1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi DATI I Riau sebagai kawasan hutan

SK Menteri Kehutanan RI No. 463/Menhut-II/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan